

II. DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Agency Theory*

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan suatu kontrak satu orang atau lebih pemegang saham dalam memerintah orang lain untuk melakukan suatu jasa atas nama pemegang saham. Dalam konteks perusahaan, orang lain yang melakukan jasa atas nama pemegang saham adalah manajer. Manajer diberi kewenangan untuk mengambil keputusan terkait dengan operasi perusahaan. Manajer diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (*goal congruence*).

Manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui lebih banyak informasi daripada pemegang saham. Manajer memiliki akses yang luas terhadap informasi perusahaan sedangkan *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja manajer. Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi. Asimetri antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik, untuk mengutamakan kepentingan pribadinya. Scott (2012) menjelaskan dua macam asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse Selection*

Manajer mengetahui semua informasi dalam perusahaan baik keadaan maupun prospek perusahaan, namun manajer tidak memberikan informasi sesungguhnya dan menyesatkan para pemegang saham.

2. *Moral Hazard*

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak kerja.

Dalam kaitannya dengan pengungkapan CSR, perusahaan yang melakukan aktivitas CSR wajib melakukan pengungkapan dalam laporan tahunannya. Namun, keputusan terkait banyaknya item yang diungkapkan masih menjadi wewenang manajer (*agent*) yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi karena pemilik saham publik (*principal*), dimana mereka tidak memiliki kendali atas tindakan yang dilakukan oleh manajer akan memiliki lebih sedikit informasi. Maka dari itu meningkatkan kepemilikan saham publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi tersebut.

2.2. *Stakeholder Theory*

Menurut Gray *et al.* (2001), *stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Para *stakeholder* yang dimaksud antara lain adalah masyarakat, karyawan, pemerintah, *supplier*, pasar modal, dan lain-lain. Asumsi dari teori *stakeholder* dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang menjadi sangat besar sehingga masyarakat memiliki hubungan tak langsung dengan perusahaan dan memperhatikan perusahaan. Praktik pengungkapan CSR memainkan peran penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dimana aktivitasnya akan

memiliki dampak, baik sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu, *stakeholder* sebagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, khususnya pemegang saham tentunya juga memerlukan informasi terkait aktivitas CSR perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan *stakeholder* melalui pengungkapan CSR di laporan tahunan.

2.3. *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar perusahaan memperoleh penerimaan masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009). Deegan *et al.* (2002) menjabarkan bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, saat itu legitimasi perusahaan terancam. Pengakuan dari masyarakat dapat diperoleh perusahaan dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan untuk menjaga legitimasi perusahaan.

2.4. *Corporate Social Responsibility*

2.4.1. *Definisi Corporate Social Responsibility*

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa CSR bukan hanya kegiatan yang sifatnya jangka pendek seperti donasi, tetapi juga meliputi isu-isu tenaga kerja, lingkungan hidup, produk bagi pelanggan, dan sosial masyarakat.

2.4.2. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Perusahaan melakukan aktivitas CSR dengan alasan tertentu. Beberapa manfaat yang didapatkan perusahaan ketika melakukan CSR adalah dalam hal reputasi manajemen, *employee satisfaction*, *investor relations and access to capital*, dan efisiensi operasional (*corporate watch report*, 2006). Dalam hubungannya dengan investor, kebanyakan investor akan menanggapi perusahaan yang melakukan kegiatan CSR lebih aman. Investor menyakini bahwa CSR akan memiliki dampak yang positif pada bisnis dalam jangka panjang.

2.4.3. *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukrela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku bagi perusahaan, khususnya perusahaan yang *go public* kepada masyarakat. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Meskipun semua perusahaan terbuka diwajibkan memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara

substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke dalam laporan tahunan.

Bagi perusahaan yang melakukan CSR, pengungkapan aktivitas CSR dalam laporan tahunan bersifat *mandatory* namun banyaknya item yang diungkapkan terkait dengan aktivitas CSR tersebut bersifat *voluntary*. Banyak sedikitnya item yang diungkapkan menjadi wewenang manajer di perusahaan tersebut.

2.5. Struktur Kepemilikan

2.5.1. Kepemilikan Publik

Menurut Suchman (1995), kepemilikan publik adalah kepemilikan oleh investor individual di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Kepemilikan saham oleh publik menggambarkan tingkat kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. Besarnya kepemilikan oleh investor individual ini biasanya di bawah 5%, sehingga investor tidak mempunyai kendali atas perusahaan.

2.6. Kepemilikan Publik dan Pengungkapan CSR

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa di antara pemegang saham dan manajer harus tercipta keselarasan tujuan. Namun dalam praktiknya manajer sering kali bertindak oportunistik dan mengutamakan kepentingan pribadinya. Manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan akan mengetahui lebih banyak informasi daripada pemegang saham, atau dikenal dengan asimetri informasi. Salah satu informasi yang diperlukan pemegang saham adalah aktivitas CSR melalui laporan tahunan. Namun, wewenang untuk menentukan seberapa banyak informasi CSR

yang disajikan ada di tangan manajer. Bertambahnya kepemilikan saham publik dalam suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan pada manajer dan diharapkan akan meningkatkan jumlah item CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Oleh karena itu, kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

2.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hubungan antara kepemilikan publik dan pengungkapan CSR telah beberapa kali dilakukan. Penelitian Indraswari dan Astika (2015) mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas dan ukuran perusahaan, serta penurunan kepemilikan saham publik dapat meningkatkan luas pengungkapan CSR. Penelitian oleh Kristi (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *media exposure* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Profitabilitas, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan saham institusi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian oleh Rindawati (2015) membuktikan bahwa tingginya laba (profitabilitas) mempengaruhi jumlah pengungkapan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pada program-program yang berkaitan dengan CSR. Sedangkan ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan saham publik tidak mempengaruhi jumlah pengungkapan CSR. Penelitian oleh Sari *et al.* (2015) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan dan semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik maka semakin besar pengungkapan CSR perusahaan. *Leverage* dan likuiditas perusahaan juga berpengaruh terhadap

banyaknya pengungkapan CSR. Namun ukuran dan umur perusahaan tidak mempengaruhi jumlah pengungkapan CSR. Berikut rangkuman dari penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Indraswari dan Astika (2015)	Variabel independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Saham Publik Variabel dependen: Pengungkapan CSR	Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2010-2012	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan Saham Publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.
Kristi (2013)	Variabel independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Media Exposure</i> Variabel dependen: Pengungkapan CSR Variabel Kontrol: Kepemilikan Saham Publik, Kepemilikan Saham Institusi	Perusahaan Publik yang Terdaftar di BEI 2010-2011	Ukuran Perusahaan dan <i>Media Exposure</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Profitabilitas, Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan Saham Institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Rindawati (2015)	Variabel Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Publik Variabel Dependen: Pengungkapan CSR	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2011-2013	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Sari <i>et al.</i> (2015)	Variabel independen: Profitabilitas, Kepemilikan Saham Publik, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Likuiditas, dan Umur Perusahaan Variabel dependen: Pengungkapan CSR	Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2012-2013	Profitabilitas, Kepemilikan Saham Publik, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

2.8. Pengembangan Hipotesis

Menurut *agency theory* (Jensen dan Meckling, 1976), di antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) harus terdapat keselarasan tujuan. Namun dalam praktiknya sering terjadi asimetri informasi dikarenakan manajer bertindak oportunistik dan lebih mementingkan tujuan pribadinya. Asimetri informasi adalah kondisi di mana informasi yang dimiliki manajer lebih banyak daripada informasi yang dimiliki pemegang saham. Informasi yang dimaksud dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan di laporan tahunan.

Pemegang saham publik adalah pihak yang tidak memiliki kendali atas perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham publik membutuhkan perlindungan investasi yang mereka tanam, perlindungan ini dapat berupa pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan pada laporan tahunan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan, jika proporsi saham yang dimiliki publik lebih besar, maka pengawasan dari publik juga lebih besar sehingga dapat mencegah manajer untuk bertindak oportunistik. Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki publik maka tingkat kelengkapan pengungkapan pada laporan tahunan akan semakin tinggi pula.

Stakeholder theory menjelaskan bahwa *stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan Gray *et al.* (2001). Praktik pengungkapan CSR memainkan peran yang penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup dan beroperasi di lingkungan masyarakat/publik. Oleh karena itu, pemegang saham publik memerlukan informasi

terkait aktivitas CSR perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak operasi perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan melalui pengungkapan CSR di laporan tahunan. Jika demikian, adanya kepemilikan saham oleh publik akan mendorong perusahaan untuk lebih luas atas pengungkapan CSR di laporan tahunan.

Menurut teori legitimasi (Reverte, 2009), jika perusahaan ingin *going concern* maka perusahaan memerlukan penerimaan dari masyarakat/publik yang dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan CSR. Pengungkapan CSR ke dalam laporan tahunan dapat digunakan perusahaan sebagai bentuk komunikasi kepada pemegang saham publik. Jika proporsi kepemilikan saham publik dalam perusahaan lebih besar, maka perusahaan perlu memperoleh penerimaan lebih besar sehingga perusahaan harus lebih luas dalam mengungkapkan CSR di laporan tahunan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian oleh Sari *et al.* (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian oleh Kristi (2013) dan Rindawati (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan, Indraswari dan Astika (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan publik justru berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Dari uraian ketiga teori tersebut dan didukung dengan hasil penelitian oleh Sari *et al.* (2015), hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

**Ha : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan
*corporate social responsibility***